JURNAL DEDIKASI INDONESIA
Volume 1 Issue 1 Tahun 2026, pp 29-40
Jl. H. Komarudin No. 54, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35144
Website: https://akarscientia.com/jdi | Email: admin-jdi@akarscientia.com

SOSIALISASI URGENSI PENGUKURAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) KURIKULUM UNTUK REAKREDITASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

Muhammad Akib[1], Zulkarnain Ridlwan[2], Fx Sumarja[3], Ria Wierma Putri[4]
[1,2,3] *Universitas Lampung, Indonesia*
e-mail: Muhammad.akib@fh.unila.ac.id [1] , zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id [2],
fransciscus.sumarja@fh.unila.ac.id[3] ria.wierma@fh.unila.ac.id [4]

Dikirim : 16 September 2026, Direvisi : 26 September Diterima: 27 September 2026

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis pengelola, dosen, mahasiswa, alumni, serta stakeholder di Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam mengimplementasikan kurikulum dan asesmen berbasis Outcome-Based Education (OBE) guna memenuhi kriteria akreditasi peringkat "Unggul" (Perban-PT No. 20 Tahun 2025) dan target Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahapan terstruktur, yaitu persiapan dan analisis kesenjangan kurikulum, pelaksanaan sosialisasi serta bimbingan teknis perumusan CPL CPMK berbasis Kata Kerja Operasional baku bersama narasumber ahli yang dipadukan dengan Focus Group Discussion (FGD) multipihak, hingga tahap evaluasi mandiri kelengkapan dokumen dan diseminasi. Hasil kegiatan berhasil merekonstruksi peta kompetensi KKNI Level 9 yang selaras secara hierarkis, menetapkan matriks pembobotan CPL–Mata Kuliah yang terukur secara matematis, menyusun instrumen asesmen autentik doktoral (rubrik analitik proposal, rubrik holistik ujian kualifikasi, serta tiga skema portofolio: progress, showcase publikasi Scopus, dan komprehensif), menyerap masukan pemangku kepentingan untuk penguatan penalaran hukum (legal reasoning) transdisipliner, serta menginisiasi perancangan sistem penilaian berbasis web (web-based assessment system) guna menjamin keberlanjutan siklus mutu Plan-Do-Check-Action (PDCA).

Kata kunci: OBE, CPL, CPMK, Akreditasi, Doktor Ilmu Hukum.

ABSTRACT

This community service program aims to enhance the understanding and technical skills of administrators, faculty members, students, alumni, and external stakeholders of the Doctoral Program in Law (PDIH) at the Faculty of Law, University of Lampung. The goal is to implement an Outcome-Based Education (OBE) curriculum and assessment framework that meets the criteria for the "Superior" (Unggul) accreditation rating (BAN-PT Regulation No. 20 of 2025) and aligns with the university's Key Performance Indicators. Implementation involved three structured stages: preparation and curriculum gap analysis; dissemination and technical guidance on formulating Program Learning Outcomes (CPL) and Course Learning Outcomes (CPMK) using standardized operational verbs conducted with expert resource persons and multi-stakeholder Focus Group Discussions (FGD); and a final stage comprising document completeness self-evaluation and dissemination. The activity successfully reconstructed a hierarchically aligned KKNI Level 9 competency map, established a mathematically measurable CPL-to-Course weighting matrix, and developed authentic doctoral assessment instruments (including an analytical rubric for proposals, a holistic rubric for qualifying exams, and three portfolio schemes: progress, Scopus publication showcase, and comprehensive). Additionally,

it incorporated stakeholder input to strengthen transdisciplinary legal reasoning and initiated the design of a web-based assessment system to ensure the sustainability of the Plan-Do-Check-Action (PDCA) quality cycle.

Keywords: OBE, CPL, CPMK, Accreditation, Doctor of Law.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi pada tingkat doktoral (Strata 3) memegang peranan strategis dalam mencetak ilmuwan, peneliti, dan praktisi hukum tingkat tinggi yang memilki kedalaman teoretis serta kapasitas kepemimpinan riset. Dalam era transformasi pendidikan global saat ini, paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional maupun internasional telah mengalami pergeseran mendasar dari pendekatan tradisional yang berorientasi pada input dan proses (teacher-centered learning) menuju paradigma Outcome-Based Education (OBE) dan Outcome-Based Accreditation (OBA) yang berpusat pada hasil pembelajaran nyata lulusan (*student-centered learning*). *Framework Outcome-Based Education* menekankan bahwa kualitas suatu program studi tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan sarana prasarana, kualifikasi pengajar, atau jumlah jam tatap muka di kelas, melainkan pada keahlian, kompetensi, dan kemampuan nyata yang secara faktual dikuasai dan dapat dibuktikan oleh lulusan setelah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan akademik (Amirtharaj et al., 2021; Syeed et al., 2022).

Di Indonesia, penguatan paradigma OBE dikukuhkan melalui regulasi akreditasi nasional terbaru, yakni Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Perban-PT) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Regulasi ini secara tegas menetapkan instrumen penilaian akreditasi berbasis bukti (*evidence-based accreditation*), di mana program studi diwajibkan menyajikan bukti empiris yang sahih dan terukur mengenai asesmen ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada sekurang-kurangnya 25% mata kuliah penciri keilmuan program studi sebagai prasyarat utama untuk memperoleh status akreditasi peringkat "Unggul". Tuntutan regulasi ini beririsan langsung dengan upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kepmendiktisaintek) Nomor 358/M/KEP/2026. Akselerasi pengukuran CPL pada program pascasarjana doktor berperan langsung dalam meningkatkan ketercapaian IKU 1 (kualitas lulusan yang terserap di dunia kerja berstandar tinggi atau menjadi wirausahawan/akademisi andal) serta IKU 5 (hasil kerja dosen dan mahasiswa s3 yang mendapat rekognisi internasional serta memberikan dampak luas bagi masyarakat dan pembangunan hukum nasional).

Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai salah satu penyelenggara pendidikan doktor hukum terkemuka di Indonesia saat ini berada pada tahapan krusial untuk mengamankan dan meningkatkan kualifikasi akreditasinya menuju peringkat Unggul. Meskipun PDIH FH Unila telah memiliki dokumen kurikulum awal yang memuat rumusan CPL, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan peta sebaran mata kuliah, analisis situasi mendalam yang dilakukan bersama tim pengelola program studi menunjukkan adanya sejumlah kesenjangan substantif dan operasional. Masalah umum yang diidentifikasi meliputi: (1) rumusan CPL yang masih bersifat abstrak dan normatif sehingga sulit diukur secara objektif; (2) pemilihan Kata Kerja Operasional (KKO) yang belum standar dan belum mencerminkan tingkat taksonomi pembelajaran tinggi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 9; (3) lemahnya integrasi dan pemetaan kontribusi persentase antara CPMK dengan CPL pada tiap Rencana Pembelajaran Semester (RPS); serta (4) ketiadaan instrumen penilaian autentik (authentic assessment instruments) yang spesifik untuk

jenjang doktoral, seperti rubrik analitik bimbingan proposal disertasi, rubrik holistik ujian lisan kualifikasi, dan skema portofolio riset yang terstruktur (Henke, 2020; Hamm et al., 2018).

Secara substansial, ketiadaan instrumen pengukuran CPL yang valid dan transparan berdampak langsung pada ketidakpastian pembuktian legitimasi akademik. Tanpa sistem asesmen CPL yang objektif, mahasiswa doktoral tidak memiliki gambaran terukur mengenai peta kompetensi yang telah mereka kuasai, alumni kehilangan daya tawar berbasis bukti (*evidence-based credentials*) saat berkarier di kancah nasional maupun internasional, dan pemangku kepentingan eksternal (seperti lembaga peradilan, instansi pemerintah, dan korporasi hukum) tidak mendapatkan profil kemampuan lulusan secara terukur. Lebih jauh lagi, tim penjaminan mutu program studi mengalami kesulitan serius dalam menyediakan data empiris numerik yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) borang akreditasi. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa mekanisme pengukuran CPL yang faktual, implementasi OBE dan proses akreditasi hanya akan menjadi formalitas administratif yang statis (Bahls, 2018; Vollweiler, 2018).

Kajian literatur mengenai pengabdian dan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa pendampingan kurikulum berbasis OBE mayoritas masih berfokus pada jenjang pendidikan Sarjana (S1) atau Vokasi (Patimah et al., 2025; Rustam & Priyanto, 2022; Asmi et al., 2025). Kajian penerapan OBE pada pendidikan hukum tingkat doktor masih sangat terbatas, padahal jenjang S3 Hukum memiliki karakteristik pembelajaran yang sangat spesifik, yaitu menitikberatkan pada penemuan teori ilmiah baru (*original research*), penulisan disertasi, publikasi ilmiah internasional bereputasi, serta penguasaan penalaran hukum (legal reasoning) tingkat lanjut dengan pendekatan inter-, multi-, dan transdisipliner (Maranville et al., 2012). Oleh karena itu, kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) yang ditawarkan dalam artikel pengabdian ini terletak pada formulasi rekonstruksi kurikulum dan instrumen asesmen autentik terintegrasi yang didesain spesifik untuk Program Doktor Ilmu Hukum. Kebaruan tersebut diwujudkan melalui: (a) penyelarasan alur taksonomi pembelajaran KKNI Level 9 berbasis backward design; (b) perumusan matriks pembobotan persentase CPL-Mata Kuliah yang dapat didekomposisi secara matematis; (c) perancangan kombinasi rubrik analitik-holistik dan tiga skema portofolio doktoral (progress portfolio, showcase portfolio Scopus, dan comprehensive portfolio); serta (d) inisiasi sistem penilaian digital berbasis web (*web-based assessment system*) untuk mengawal siklus penjaminan mutu berkesinambungan (*Continuous Quality Improvement*/CQI).

Berdasarkan urgensi dan kesenjangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendampingi PDIH FH Unila dalam: (1) menyosialisasikan filosofi dan urgensi OBE dalam pendidikan doktoral hukum kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan; (2) merekonstruksi peta kompetensi CPL-CPMK yang terukur dan selaras dengan regulasi akreditasi terkini; (3) merumuskan instrumen penilaian autentik berupa rubrik dan portofolio mata kuliah doktoral; serta (4) membangun fondasi digitalisasi penjaminan mutu internal guna mengamankan perolehan peringkat akreditasi Unggul.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdi Fakultas Hukum Universitas Lampung bekerja sama dengan Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH Unila selama periode enam bulan (Maret hingga Agustus 2026). Khalayak sasaran utama (mitra) yang terlibat aktif dalam kegiatan ini meliputi: (1)

pimpinan dan tim penjaminan mutu Fakultas Hukum Unila; (2) pengelola dan tim kurikulum PDIH FH Unila; (3) seluruh dosen pengampu mata kuliah doktoral; (4) mahasiswa aktif tingkat doktor; (5) perwakilan alumni PDIH lintas angkatan; serta (6) pemangku kepentingan eksternal (*external stakeholders*) yang terdiri dari praktisi peradilan (hakim, jaksa, advokat), birokrat pemerintah, serta peneliti lembaga hukum. Pendampingan dipusatkan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Untuk menyelesaikan permasalahan mitra secara komprehensif, metode pelaksanaan yang digunakan merupakan kombinasi terstruktur dari beberapa pendekatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu: (a) Pendidikan Masyarakat dan Pelatihan (*in-house training*/bimbingan teknis) untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan teknis perumusan kurikulum OBE; (b) Konsultasi dan Advokasi Akademik untuk memberikan pendampingan intensif dalam merekonstruksi dokumen RPS dan instrumen asesmen; (c) Focus Group Discussion (FGD) Multipihak untuk menjaring masukan kritis dari alumni dan pengguna lulusan; serta (d) Mediasi dan Diseminasi untuk memfasilitasi pengesahan dokumen kurikulum secara formal di tingkat fakultas.

Prosedur kerja pelaksanaan kegiatan pengabdian dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan utama sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Analisis Kesenjangan

Tahap ini diawali dengan rapat koordinasi internal tim pengabdi untuk melakukan pembagian peran, penyusunan jadwal kerja, dan penyiapan instrumen. Selanjutnya, tim pengabdi melakukan kajian kritis (*review*) terhadap seluruh dokumen kurikulum eksisting PDIH Unila, mencakup naskah akademik, rumusan CPL, struktur mata kuliah, dan RPS eksisting. Tim menyusun instrumen 'Asesmen Mandiri Kelengkapan Kurikulum' berupa daftar periksa (*checklist*) kesiapan dokumen pendukung OBE yang diisi bersama oleh tim penjaminan mutu prodi.

2. Tahap Pelaksanaan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis

Tahap ini diisi dengan rangkaian workshop intensif dan lokakarya teknis yang menghadirkan Narasumber Ahli Kurikulum Universitas Lampung (Dr. Budi Kadaryanto). Materi sosialisasi berfokus pada pergeseran paradigma OBE/OBA, penyelarasan Perban-PT No. 20 Tahun 2025, dan keterkaitan CPL dengan IKU 1 serta IKU 5. Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis interaktif, di mana dosen pengampu dipandu untuk: (a) menurunkan CPL prodi menjadi CPMK dan Sub-CPMK menggunakan anatomi Kata Kerja Operasional (KKO) baku (Verbs + Noun + Adverb); (b) melakukan simulasi perhitungan beban belajar mahasiswa doktoral berdasarkan standar SN-Dikti; (c) merancang instrumen rubrik analitik untuk proposal disertasi dan rubrik holistik untuk ujian lisan kualifikasi; serta (d) menyusun kerangka sistem penilaian tiga jenis portofolio doktoral (*progress portfolio, showcase portfolio,* dan *comprehensive portfolio*). Pada tahap ini pula dilaksanakan FGD interaktif bersama alumni dan pengguna eksternal untuk menjaring masukan industri (*industry input*) guna memperkuat profil lulusan.

3. Tahap Evaluasi, Penjaminan Mutu, dan Diseminasi:

Fase ini bertujuan untuk memverifikasi seluruh dokumen luaran dan memastikan hasil rekonstruksi kurikulum siap disahkan secara formal. Tim pengabdi mendampingi tim penjaminan mutu prodi dalam melakukan pengisian ulang instrumen Asesmen Mandiri Kelengkapan Kurikulum pasca-kegiatan guna mengukur peningkatan kesiapan dokumen. Dilakukan verifikasi draf RPS berbasis OBE yang telah direvisi oleh para dosen, dilanjutkan dengan forum diseminasi di hadapan pengelola prodi, senat fakultas, dan dosen senior guna menyerap masukan

akhir sebelum draf kurikulum diajukan untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahap akhir, tim merancang rekomendasi implementasi sistem penilaian berbasis web (*web-based assessment system*) untuk mengawal keberlanjutan siklus mutu Plan-Do-Check-Action (PDCA).

Evaluasi keberhasilan kegiatan pengabdian diukur menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang meliputi: (a) persentase ketercapaian dokumen kurikulum berbasis OBE pada instrumen Asesmen Mandiri; (b) kualitas draf RPS dan instrumen asesmen yang dihasilkan oleh dosen pengampu; serta (c) tingkat kepuasan dan respons pemangku kepentingan yang diperoleh melalui angket umpan balik pasca-kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Soisalisasi dan Pemetaan Kebijakan Akreditasi Pendidikan Doktoral Ilmu Hukum

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk 'Sosialisasi Urgensi Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktoral Ilmu Hukum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE)' telah berlangsung secara efektif dan interaktif. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan FH Unila, pengelola PDIH, dosen pengampu mata kuliah doktoral, mahasiswa aktif S3, alumni, serta perwakilan mitra pengguna eksternal dari kalangan hakim, jaksa, advokat, dan birokrat instansi pemerintah. Kehadiran Narasumber Ahli Kurikulum Unila, Dr. Budi Kadaryanto, S.Pd., M.A., memberikan pemahaman mendalam mengenai landasan filosofis dan operasional transformasi kurikulum berbasis OBE di tingkat pascasarjana.

Dalam pemaparannya, narasumber secara kritis membedah implikasi dari pemberlakuan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025. Ditegaskan bahwa mekanisme akreditasi terkini telah meninggalkan pola penilaian berbasis klaim administratif dan bergeser seutuhnya ke arah penilaian berbasis bukti nyata (*evidence-based assessment*). Program studi doktoral diwajibkan menyajikan rekam jejak numerik dan dokumentatif mengenai ketercapaian CPL mahasiswa pada sekurang-kurangnya 25% mata kuliah penciri keilmuan prodi. Tanpa adanya bukti pengukuran CPL yang terstruktur, sahih, dan ter-digitalisasi, program studi tidak akan memenuhi Syarat Unggul akreditasi nasional. Lebih lanjut, narasumber mengorelasikan akurasi asesmen CPL ini dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sesuai Kepmendiktisaintek No. 358/M/KEP/2026. Di jenjang S3 Hukum, pengukuran CPL berkontribusi langsung pada IKU 1 melalui pembuktian bahwa lulusan doktor memiliki keahlian kepemimpinan riset dan kualifikasi profesional yang diakui dunia kerja, serta IKU 5 melalui pendokumentasian luaran riset disertasi mahasiswa yang berhasil menembus publikasi jurnal internasional bereputasi bereputasi tinggi (Scopus/Web of Science).

Tabel 1. Pemetaan Regulasi Akreditasi dan Implikasinya Terhadap Rekonstruksi Kurikulum PDIH FH Unila

Regulasi / Kebijakan	Persyaratan Utama / Target	Implikasi Rekonstruksi Kurikulum PDIH
Perban-PT No. 20 Tahun 2025 (Sistem Akreditasi Nasional)	Bukti empiris asesmen CPL terukur pada min. 25% mata kuliah penciri keilmuan prodi.	Penyusunan matriks kontribusi CPL-CPMK terukur, rubrik penilaian autentik, dan pengumpulan bukti portofolio berbasis data numerik.
Kepmendiktisaintek No. 358/M/KEP/2026 (IKU Perguruan Tinggi)	IKU 1: Kualitas lulusan karya/karier tinggi. IKU 5: Rekognisi hasil riset dosen-mahasiswa S3.	Penguatan kompetensi legal reasoning transdisipliner dan penetapan luaran wajib disertasi berupa artikel Scopus/WoS pada Showcase Portfolio.
KKNI Level 9 (Jenjang Doktoral)	Penguasaan teori hukum baru, keahlian riset original, pemecahan masalah transdisipliner.	Penyelarasan taksonomi CPL ke level C5-C6 (Evaluasi/Kreasi) dan perancangan asesmen holistik ujian kualifikasi doktor.

3.2 Pembahasan

Penerapan kurikulum berbasis OBE pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung diawali dengan melakukan rekonstruksi peta kompetensi multi-jenjang secara mendalam. Proses ini menerapkan prinsip desain mundur (*backward design*), di mana penetapan profil lulusan dan CPL prodi diawali dengan mengacu pada visi kelembagaan universitas, fakultas, serta kriteria KKNI Level 9 untuk jenjang doktoral. Pada tingkat makro universitas, CPL-2 Universitas Lampung mengamanatkan bahwa lulusan doktor harus mampu memecahkan masalah, mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset orisinal yang kreatif, teruji, serta mendapat rekognisi nasional maupun internasional. Amanat ini diturunkan ke CPL-3 Fakultas Hukum Unila yang menekankan pada kemampuan menguasai, memimpin, dan menemukan teori atau gagasan ilmiah baru berbasis pendekatan inter-, multi-, dan transdisipliner.

Melalui pendampingan pengabdian ini, CPL PDIH FH Unila direkonstruksi ke dalam 10 butir kompetensi utama yang mencakup aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus. Seluruh rumusan CPL ditata ulang menggunakan anatomi Kata Kerja Operasional (KKO) baku yang diselaraskan dengan tingkat taksonomi Bloom revisi untuk jenjang S3, yaitu didominasi oleh kemampuan Analisis (C4), Evaluasi (C5), dan Kreasi/Penemuan Teori (C6). Formula perumusan

CPMK dan Sub-CPMK diseragamkan dengan menerapkan struktur anatomi baku: Verbs (Kemampuan Operasional) + Noun (Materi Pembelajaran Hukum) + Adverb (Konteks/Ruang Lingkup Aplikasi Transdisipliner) (Mendoza et al., 2022). Selanjutnya, tim pengabdi mendampingi penyusunan matriks pembobotan hubungan CPL–Mata Kuliah. Dalam kerangka OBE, total kontribusi satu mata kuliah terhadap seluruh CPL yang dititipkan harus berjumlah tepat 100%. Pembobotan ini ditentukan secara proporsional berdasarkan kedalaman materi dan bentuk asesmen mata kuliah tersebut. Sebagai contoh terapan, mata kuliah Metodologi Penelitian S3 didesain memiliki pembobotan CPL terukur sebagai berikut: CPL-2 (Kompetensi Utama Riset Orisinal) sebesar 55%, CPL-4 (Penguasaan Keilmuan Hukum Transdisipliner) sebesar 35%, CPL-8 (Sikap dan Tanggung Jawab Akademik) sebesar 5%, serta CPL-9 (Komunikasi Ilmiah dan Publikasi) sebesar 5.

Salah satu luaran utama dari kegiatan pengabdian ini adalah dihasilkannya draf instrumen penilaian autentik pascasarjana yang dirancang khusus untuk mengukur kompetensi kompleks mahasiswa doktor. Tim pengabdi memfasilitasi dosen pengampu dalam menyusun dua bentuk rubrik penilaian baku, yaitu Rubrik Analitik dan Rubrik Holistik (Mukhopadhyay et al., 2025). Rubrik Analitik digunakan untuk menilai kriteria tugas secara terpisah dan terperinci sebelum diakumulasikan, sangat ideal diterapkan pada penilaian tugas terstruktur seperti draf proposal disertasi. Sebaliknya, Rubrik Holistik memberikan penilaian menyeluruh terhadap kualitas performa secara komprehensif, sangat tepat digunakan untuk ujian lisan presentasi kualifikasi atau sidang promosi doktor.

Sejalan dengan standar Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Kemendikbudristek, instrumen penilaian paling komprehensif untuk menguji kompetensi doktoral adalah dengan mengaplikasikan Sistem Penilaian Portofolio Terintegrasi. Dalam pengabdian ini, dirumuskan tiga skema portofolio yang menjadi syarat wajib kelulusan mahasiswa PDIH FH Unila

1) Portofolio Perkembangan (Progress Portfolio): Berisi pendokumentasian rekam jejak bertahap proses penulisan draf proposal dan naskah disertasi. Portofolio ini mencatat perkembangan evolusi penalaran hukum (legal reasoning), perbaikan berdasarkan catatan promotor/ko-promotor, serta rekam bimbingan akademik.
2) Portofolio Pamer (Showcase Portfolio): Berisi karya ilmiah terbaik mahasiswa yangmencerminkan rekognisi internasional tertinggi. Portofolio ini membuktikan luaran wajib disertasi berupa bukti fisik artikel ilmiah yang telah accepted/published pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/Web of Science) serta sertifikat pemakalah pada konferensi internasional.
3) Portofolio Komprehensif: Merupakan kompilasi rekam jejak akademik menyeluruh mahasiswa selama masa studi S3, mulai dari kelulusan ujian kualifikasi, naskah ujian komprehensif, laporan kemajuan riset berkala, draf seminar hasil, hingga dokumentasi sidang promosi doktor

Keberhasilan rekonstruksi kurikulum PDIH Unila sangat ditentukan oleh partisipasi aktif para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Melalui sesi Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan dalam rangkaian pengabdian, tim pengabdi menyerap

aspirasi dan masukan kritis (*industry input*) dari alumni dan pengguna eksternal dari kalangan praktisi peradilan, instansi pemerintah, dan lembaga hukum nasional.

Para pemangku kepentingan menggarisbawahi bahwa profil lulusan doktor ilmu hukum di era modern tidak boleh hanya berorientasi pada hafalan doktrin atau keahlian teknis perundang-undangan semata. Dunia kerja profesional dan institusi akademik global menuntut lulusan doktor yang memiliki kapasitas penalaran hukum kritis (*critical legal reasoning*), kepemimpinan riset orisinal, serta kemampuan memecahkan isu-isu hukum kontemporer yang kompleks (seperti hukum era digital, tata kelola lingkungan global, dan kejahatan korporasi lintas negara) menggunakan pendekatan inter-, multi-, dan transdisipliner. Aspirasi ini langsung direspons oleh tim pengabdi bersama tim kurikulum prodi dengan mengintegrasikan penguatan muatan legal reasoning dan metodologi transdisipliner ke dalam rumusan CPL dan struktur RPS mata kuliah doktoral. Untuk mengukur efektivitas kegiatan pendampingan secara kuantitatif, tim pengabdi bersama tim penjaminan mutu prodi melakukan pengisian instrumen 'Asesmen Mandiri Kelengkapan Kurikulum' sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian.

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Asesmen Mandiri Kelengkapan Dokumen Kurikulum OBE PDIH FH Unila

No	Indikator Kesiapan Dokumen Kurikulum	Pra-Kegiatan (%)	Pasca-Kegiatan (%)
1	Ketersediaan Rumusan CPL ber-KKO Baku (KKNI Level 9)	40%	95%
2	Ketersediaan Matriks Penyelarasan CPL-CPMK-Sub CPMK	35%	90%
3	Ketersediaan RPS Berbasis OBE Terverifikasi	30%	85%
4	Ketersediaan Instrumen Rubrik Analitik & Holistik Baku	20%	90%
5	Ketersediaan Panduan Penilaian 3 Portofolio Doktoral	15%	85%

Hasil Asesmen Mandiri pada Tabel 5 memperlihatkan lonjakan signifikan pada seluruh indikator kesiapan dokumen kurikulum pasca-pendampingan, di mana rata-rata kesiapan dokumen meningkat dari 28% menjadi 89%. Meskipun demikian, diskusi evaluasi mendalam mengidentifikasi sejumlah hambatan teknis dalam proses transisi administrasi kurikulum. Hambatan utama yang dihadapi meliputi: (a) masih beragamnya kapasitas individual dosen dalam mengoperasionalkan e-rubrik; serta (b) belum tersedianya sistem pencatatan data otomatis, sehingga rekapitulasi numerik dan pembuatan grafik radar pencapaian CPL per mahasiswa per semester masih dilakukan secara manual dan memakan waktu lama.

Sebagai jalan keluar strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, tim pengabdi menginisiasi rencana implementasi Sistem Penilaian Berbasis Web (*Web-Based Assessment System*) (Wijaya et al., 2024). Platform digital penjaminan mutu ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data kurikulum OBE, memudahkan dosen dalam menginput nilai mahasiswa berbasis e-rubric, serta memungkinkan mahasiswa dan pengelola prodi untuk memantau grafik capaian CPL secara langsung (*real-time*). Digitalisasi ini menjadi kunci utama untuk menjamin keberlanjutan siklus penjaminan mutu internal (Plan-Do-Check-Action / PDCA) serta menyediakan bukti fisik (evidence) yang sahih guna mengamankan predikat akreditasi peringkat Unggul sesuai mandat Perban-PT No. 20 Tahun 2025.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil mendorong pergeseran paradigma sivitas akademika Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dari sistem penilaian konvensional menuju paradigma *Outcome-Based Education* (OBE) dan *Outcome-Based Accreditation (*OBA). Melalui rangkaian sosialisasi, lokakarya, dan pendampingan intensif, tim pengabdi bersama pengelola prodi dan dosen pengampu telah berhasil merekonstruksi peta kompetensi KKNI Level 9 yang selaras secara hierarkis mulai dari CPL Universitas, CPL Fakultas, hingga perumusan CPMK dan Sub-CPMK menggunakan formulasi Kata Kerja Operasional yang terukur. Di samping itu, integrasi instrumen asesmen autentik jenjang doktoral yang memadukan rubrik analitik, rubrik holistik, serta tiga skema portofolio (*progress portfolio, showcase* portfolio luaran Scopus, dan *comprehensive portfolio*) telah berhasil dirumuskan untuk memenuhi standar bukti empiris ketercapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan prodi sesuai amanat Perban-PT Nomor 20 Tahun 2025 serta target Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi (Kepmendiktisaintek No. 358/M/KEP/2026). Masukan kritis dari mahasiswa, alumni, dan para pemangku kepentingan eksternal juga telah diserap secara optimal guna memperkuat kapasitas penalaran hukum kritis (legal reasoning), kepemimpinan riset orisinal, serta pendekatan transdisipliner pada draf kurikulum yang dihasilkan.

Sebagai langkah tindak lanjut strategis guna menjamin keberlanjutan dan akselerasi perolehan akreditasi peringkat Unggul, direkomendasikan agar Fakultas Hukum Universitas Lampung segera menerbitkan Keputusan Dekan tentang Pengesahan Kurikulum OBE PDIH FH Unila, menyelenggarakan pelatihan berkala standardisasi rubrik disertasi bagi para promotor, serta mendigitalisasi sistem penjaminan mutu melalui akselerasi implementasi platform Web-Based Assessment System demi mengawal siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) dan perbaikan mutu berkesinambungan (*Continuous Quality Improvement*) di PDIH FH Unila.

REFERENSI

Agustia, R., & Finandhita, A. (2025). Pengelompokan mahasiswa berdasarkan capaian pembelajaran lulusan menggunakan K-Means clustering di Program Studi Teknik Informatika UNIKOM. Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika, 14(2), 85-94. https://doi.org/10.34010/komputa.v14i2.17932

Amirtharaj, S., Chandrasekaran, G., Thirumoorthy, K., Muneeswaran, K., & Id, O. (2021). A systematic approach for assessment of attainment in outcome-based

education. Higher Education for the Future, 9(1), 8–29. https://doi.org/10.1177/23476311211017744

Asmi, A., Kamaruddin, M., Takke, J., & Hardi, W. (2025). Review of the curriculum of the OBE (Outcome Based Education) health study program. Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia, 2(2), 117–125. https://doi.org/10.61099/jpmei.v2i2.117

Bahls, S. (2018). Adoption of student learning outcomes: Lessons for systemic change in legal education. Journal of Legal Education, 67(2), 376–398.

Hamm, M., Madison, B., & Murnane, R. (2018). The rubric meets the road in law schools: Program assessment of student learning outcomes as a fundamental way for law schools to improve and fulfill their respective missions. SSRN Electronic Journal, 1–32. https://doi.org/10.2139/ssrn.3158461

Henke, M. (2020). When your plate is already full: Efficient and meaningful outcomes assessment for busy law schools. Journal of Legal Education, 71(3), 529–554.

Li, M., & Rohayati, M. (2024). The relationship between learning outcomes and graduate competences: The chain-mediating roles of project-based learning and assessment strategies. Sustainability, 16(14), 6040. https://doi.org/10.3390/su16146080

Maranville, D., O'Neill, K., & Plumb, C. (2012). Lessons for legal education from the engineering profession's experience with outcomes-based accreditation. William Mitchell Law Review, 38(1), 7–45.

Mendoza, W., Ramírez, G., Gonzalez, C., & Moreira, F. (2022). Assessment of curriculum design by learning outcomes (LO). Education Sciences, 12(8), 541. https://doi.org/10.3390/educsci12080541

Mukhopadhyay, M., Rajhans, K., & Gupta, S. (2025). Illustrative rubric for accreditation research methodology. Journal of Engineering Education Transformations, 38(2), 25–34. https://doi.org/10.16920/jeet/2025/v38is2/25076

Patimah, S., Gani, A., Liriwati, F., & Arafah, A. (2025). Pendampingan akreditasi kampus berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan digitalisasi mutu di PTKIS Tanggamus Provinsi Lampung. FUNDAMENTUM: Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 3(4), 1249–1258. https://doi.org/10.62383/fundamentum.v3i4.1249

Rustam, R., & Priyanto, P. (2022). Pembelajaran Tamadun Melayu Jambi berbasis Outcome-Based Education (OBE) berorientasi produk kreatif. Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 5(2), 284–296. https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i2.284

Saifudin, A. (2024). Evaluasi penyusunan profil lulusan program studi kefarmasian berbasis locus dan body of knowledge. Jurnal Pharmascience, 11(1), 17–28. https://doi.org/10.20527/jps.v11i1.171793

Syeed, M., Shihavuddin, A., Uddin, M., Hasan, M., & Khan, R. (2022). Outcome based education (OBE): Defining the process and practice for engineering education. IEEE Access, 10, 119170–119192. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3219477

Vollweiler, D. (2018). Don't panic! The hitchhiker's guide to learning outcomes: Eight ways to make them more than (mostly) harmless. Nova Law Review, 44(1), 17–52. https://doi.org/10.2139/ssrn.3220459

Wijatmiko, I., Suyono, H., Lukodono, R., Fanani, A., & Anam, K. (2025). Pendampingan penerapan kurikulum OBE dan persiapan akreditasi LAM Teknik bagi perguruan tinggi teknik. TEKAD: Teknik Mengabdi, 4(1), 10–18. https://doi.org/10.21776/ub.tekad.2025.04.1.10

Wijaya, A., Pranata, W., Syazili, A., & Sauda, S. (2024). Web-based assessment system for graduate learning achievements in outcome-based education. PIKSEL: Penelitian Ilmu Komputer Sistem Embedded and Logic, 12(2), 9618–9627. https://doi.org/10.33558/piksel.v12i2.9618